

URGENSI SEKOLAH LABORATORIUM BAGI PENGEMBANGAN INOVASI SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF DI KALIMANTAN BARAT

THE URGENCY OF LABORATORY SCHOOL FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF AN INCLUSIVE EDUCATIONAL SYSTEM IN KALIMANTAN BARAT

Fitri Darsini ¹⁾, Kristianus ²⁾, Eusabinus Bunau ^{3*)}

^{1,2,3}Dewan Pendidikan Kalimantan Barat, Jl. Sutan Syahrir No.7 Pontianak
*e-mail: fitriabassuni6@gmail.com

Diterima: 12 Nov 2022; Revisi : 23 Des 2022; Diterbitkan: 30 Des 2022

ABSTRACT

The implementation of Merdeka Belajar is closely related to inclusive educational system development. It is rare to find inclusive schools commencing differentiated learning applying a student-centered approach in Kalimantan Barat. The vague perceptions of the stakeholders about the road map of inclusive education as a system, along with all its potentials and hindrances, is the main reason why the inclusive educational system needs to apply better in Kalimantan Barat. Knowledge and understanding of inclusive education result in minimum development of flexible, differentiated and collaborative learning pursuits in Merdeka Belajar. This descriptive study aims to depict the urgency of laboratory schools to study and develop the innovation of an inclusive educational system in Kalimantan Barat. Online and offline Focus Group Discussions (FGDs) were conducted involving Regents/Mayors and/or Heads of Educational and Cultural Office, Headmasters, dan Teachers in 13 regencies/cities in Kalimantan Barat. The study reveals that Lab Schools applying differentiated and student-centered learning models and culture is highly urgent to exist in order to improve the quality of education in Kalimantan Barat. The Educational Board of Kalimantan Barat recommend the founding of a Lab School as a centre of study and innovation development of the inclusive educational system in Kalbar in order to manifest the collaboration of central and provincial government in extending service excellence of education to accommodate students' diversity and to accelerate the escalation of Kalbar Human Development Index (HDI)

Keywords: *inclusive education, lab school, merdeka belajar, IPM Kalbar*

ABSTRAK

Implementasi Merdeka Belajar berkait erat dengan pembangunan sistem pendidikan yang inklusif. Masih sangat jarang ditemukan satuan-satuan pendidikan di Kalimantan Barat yang sudah menerapkan sistem pendidikan inklusif yang berpusat kepada kebutuhan peserta didik. Penyebabnya adalah belum terpetakannya pemahaman para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kalimantan Barat tentang pendidikan inklusif sebagai sebuah sistem beserta potensi dan kendala implementasinya. Kurangnya pengetahuan hingga kesalahan persepsi tentang sistem pendidikan inklusif mengakibatkan minimnya pengembangan model pembelajaran yang fleksibel, terdiferensiasi dan kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam konsep Merdeka Belajar. Kajian ini bersifat deskriptif yang dirancang untuk menggambarkan urgensi sekolah laboratorium dan pengembangan inovasi sistem pendidikan inklusif di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)* secara daring dan luring, kajian ini melibatkan *purposive respondent* yang terdiri dari Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah dan Guru di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Penelitian ini menemukan bahwa Sekolah Laboratorium (*Lab School*) di Kalimantan Barat yang menerapkan budaya dan model pembelajaran terdiferensiasi dan berpusat pada murid sangat perlu (*urgent*) untuk ditingkatkan kualitas pendidikannya. Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan dibentuknya *Lab School* sebagai lembaga kajian dan pengembangan inovasi sistem pendidikan inklusif di Kalimantan Barat untuk merealisasikan kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam melayani keberagaman peserta didik dan percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Kata kunci: pendidikan inklusif, sekolah laboratorium, merdeka belajar, IPM Kalbar

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi secara global telah mengakibatkan perubahan kehidupan secara multidimensional di berbagai bidang. Salah satu perubahan yang terjadi adalah di bidang pendidikan. Banyak negara yang melakukan adaptasi terhadap sistem pendidikan untuk mengantisipasi hingga memenuhi kebutuhan perubahan untuk menjadi negara maju di masa depan. Secara umum, negara-negara tersebut mengadaptasi sistem pendidikan mereka ke sistem pendidikan yang berfokus kepada kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik secara fleksibel, inklusif, dan kolaboratif.

Arah Pendidikan Nasional Indonesia mau tidak mau juga harus diadaptasi ke arah yang serupa melalui Program Merdeka Belajar sebagai sebuah terobosan untuk memenuhi target kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di tahun 2045. Indonesia membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan 2045 yaitu, membangun Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Mengacu kepada elemen-elemen pendidikan yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat maju, tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang merupakan elemen yang harus digarap secara tepat dan terukur di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan nilai IPM yang masih rendah di bidang pendidikan perlu segera dilakukan terobosan untuk melakukan percepatan implementasi Merdeka Belajar melalui sebuah sistem pendidikan yang inklusif. Hal ini mengingat kondisi nyata hasil belajar

pendidikan dasar dan menengah yang masih kurang memadai kualitasnya, antara lain kemampuan literasi, numerasi, dan sains yang rendah (60-71% siswa berada dibawah kompetensi minimum), sebanyak 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan (2018) dan hanya 29% siswa Indonesia yang memiliki pola pikir untuk berkembang karena tidak takut gagal dan lebih termotivasi dan menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting. Kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah disebabkan oleh kualitas guru, infrastruktur dan kesenjangan pada pemerintahan (Permana, 2019).

Implementasi Merdeka Belajar diharapkan dapat membangun sebuah sistem pendidikan di masa depan yang kreatif, kolaboratif, serta berbasis pengalaman dan didukung teknologi/digital, tetapi aman dan inklusif. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan berbagai program terkait realisasi Merdeka Belajar di Indonesia, antara lain berupa Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

Namun demikian, program-program pemerintah pusat ini akan lama terealisasi jika tidak didukung oleh aksi nyata pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan implementasi Merdeka Belajar di daerahnya. Terlebih karena kesenjangan pemerintah merupakan faktor utama penyebab rendahnya kualitas hasil pendidikan dasar dan menengah dimana hampir tak ada korelasi antara pelatihan guru dan bantuan pembiayaan sekolah dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah.

Kalimantan Barat sangat memerlukan percepatan implementasi Merdeka Belajar untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, kualitas hasil pembelajaran, dan pemerataan distribusi kualitas pendidikan yang inklusif dan aman. Implementasi Merdeka Belajar berkait erat dengan pembangunan sistem pendidikan yang inklusif. Masih sangat jarang ditemukan satuan-satuan pendidikan di Kalimantan Barat yang sudah menerapkan sistem pendidikan inklusif yang berpusat kepada kebutuhan murid. Hal ini dikarenakan masih belum terpetakannya pemahaman para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kalimantan Barat tentang pendidikan inklusif sebagai sebuah sistem beserta potensi dan kendala implementasinya.

Kurangnya pengetahuan hingga kesalahan persepsi tentang sistem pendidikan inklusif mengakibatkan minimnya pengembangan model-model pembelajaran yang fleksibel, terdiferensiasi, dan kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam konsep Merdeka Belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan laboratorium-laboratorium satuan pendidikan yang menerapkan budaya dan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik untuk mengembangkan kajian-kajian dan inovasi pendidikan inklusif di Kalbar.

Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan urgensi sekolah laboratorium untuk kajian dan pengembangan inovasi sistem pendidikan inklusif di Kalimantan Barat.

Sekolah Laboratorium

Konsep sekolah laboratorium adalah menciptakan sekolah-sekolah baru sebagai laboratorium inovasi yang menjadi pilot bagi pendekatan-

pendekatan baru untuk mengajar, menciptakan kurikulum baru, dan mengupayakan peningkatan otonomi dan agen pendidikan bagi para peserta didik. Konsep *Lab School* pertama kali dikenal sebagai “*attached schools*” sebuah universitas di Eropa dan Jepang pada abad ke 17. *Lab School* pertama didirikan oleh John Dewey di Universitas Chicago pada tahun 1896 dengan fokus mengajarkan anak-anak untuk “bertanya, mengembangkan pendekatan pembelajaran, dan tantangan terhadap cara berpikir konvensional untuk mendapatkan ide orisinal (Armijo, 2022). John Dewey mendefinisikan sekolah laboratorium sebagai sekolah masyarakat yang diabstraksi dan bersifat eksperimental, berada di bawah kendali eksperimen sains yang disesuaikan dengan tujuan didirikannya sekolah tersebut. Secara pragmatis, sekolah laboratorium adalah tempat berlangsungnya eksperimen berbagai metode pendidikan yang akan menghasilkan sebuah cara untuk menata dan memahami kurikulum (Durst, 2010).

Pendidikan Inklusif

Inklusi adalah sebuah proses untuk mengatasi hambatan yang membatasi kehadiran, partisipasi dan capaian siswa (UNESCO, 2015). Pendidikan inklusif bukan nama lain dari pendidikan luar biasa, tetapi pendidikan yang melibatkan dan meminimalkan hambatan dan partisipasi serta memaksimalkan sumber-sumber pendukungnya (AINSCOW et al., 2004). Secara luas, pendidikan inklusif diartikan sebagai pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Hak dan kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak

dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi.

Salah satu ciri khas pendidikan inklusif adalah diterapkannya strategi pembelajaran terdiferensiasi. Instruksi terdiferensiasi yang digunakan dalam kelas inklusif adalah model pedagogis yang secara teoritis diasosiasikan dengan penanganan keberagaman murid dan pendidikan inklusif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang cocok untuk kelas inklusif karena strategi pembelajaran terdiferensiasi dapat diterapkan untuk mayoritas murid dengan atau tanpa kebutuhan khusus (Mittler, 2012).

Bosker (2005) menggambarkan diferensiasi sebagai solusi pendidikan untuk mengatasi perbedaan antar siswa; sementara Woolfolk (2019) merujuk diferensiasi sebagai seperangkat komponen pendidikan dan pengajaran yang beragam yang mempertimbangkan karakter spesifik murid-murid. Baglieri & Knopf (2004) menyederhanakan diferensiasi sebagai sebuah proses yang mengasumsikan sebuah garis dasar bagi semua, dan kemudian menyediakan modifikasi bagi murid-murid yang berkesulitan belajar atau yang berkemampuan di atas rata-rata.

Gheysens et al. (2020) menekankan pentingnya mempresentasikan dan memandang instruksi terdiferensiasi sebagai sebuah model pedagogi yang dianggap Tomlinson (1999) sebagai sebuah filosofi pengajaran dan sekumpulan praktek mengajar yang berakar pada kepercayaan bahwa murid itu beragam dan guru seharusnya menyesuaikan instruksi yang mereka berikan secara baik. Tujuan dari instruksi terdiferensiasi

adalah semakin seringnya adaptasi terhadap keberagaman murid dalam minat, kesiapan dan profil pembelajaran. Terungkap bahwa faktor filosofis guru, yaitu, pola pikir yang berkembang (*growth mindset*) dan kompas etika yang berorientasi kepada murid sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan pembelajaran terdiferensiasi. Kurangnya salah satu faktor filosofis pada guru akan mengakibatkan kurangnya adaptasi terhadap keberagaman siswa.

METODE

Kajian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)*. Responden kajian terdiri dari Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1 orang kepala sekolah dan 3 orang guru di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Tidak diperoleh data dari Kabupaten Melawi karena tidak ada respon dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. *FGD* dilaksanakan secara luring dan daring dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal FGD di 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jadwal	Moda
1	Sekadau	4-10-2021	Luring
2	Sanggau	5-10-2021	Luring
3	Sambas	7-10-2021	Luring
4	Sintang	12-10-2021	Daring
5	Landak	14-10-2021	Daring
6	Ketapang	15-10-2021	Daring
7	Kapuas Hulu	19-10-2021	Daring
8	Kayong Utara	1-11-2021	Daring
9	Pontianak	1-11-2021	Luring
10	Bengkayang	8-11-2021	Luring
11	Singkawang	9-11-2021	Luring
12	Mempawah	9-11-2021	Luring
13	Kubu Raya	25-11-2021	Luring

FGD dilaksanakan berdasar kepada rujukan definisi pendidikan inklusif menurut UNESCO (2015) dan AINSCOW et al., (2004). Pengembangan pertanyaan diskusi dirumuskan dan disusun dengan merujuk kepada hasil penelitian César & Santos (2006), Hofman & Kilimo (2014), Kurtt Ph D (2006), Rofiah et al. (2020), Twyman et al. (2010), Supriyanto (2019) dan Rofiah & Rofiana (2017).

Pertanyaan FGD

1. Berdasarkan definisi tersebut diatas apakah pendidikan inklusif (PI) sudah diimplementasikan di daerah yang Bapak/Ibu pimpin?
2. Jika sudah, bagaimana model implementasi dan manifestasi dukungan kebijakan Pemda terhadap implementasi pendidikan inklusif dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)?
 - a. Akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua kebutuhan,
 - b. Penerapan model pembelajaran dan *assessment* yang berpusat pada murid,
 - c. Jaminan kualitas guru sebagai fasilitator (bukan pemberi ilmu) dan kepala satuan pendidikan (satdik) sebagai pendukung utama pengembangan kualitas guru,
 - d. Ekosistem pendidikan yang inklusif dan bebas perundungan,
 - e. Manifestasi dukungan kebijakan Pemda terhadap implementasi pendidikan inklusif dalam APBD,
 - f. Korelasi pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan model pembelajaran yang diterapkan di satuan pendidikan,

- g. Kemandirian dan daya kolaborasi siswa dalam kebhinekaan, dan
 - h. Fleksibilitas kurikulum, optimasi infrastruktur, pedagogi pembelajaran, rasio guru dan peserta didik dalam pemenuhan kebutuhan daya dan gaya belajar serta pembangunan karakter peserta didik.
3. Jika belum, apa kendala implementasi di daerah yang Bapak/Ibu pimpin?
 4. Apakah sudah ada institusi yang ditunjuk di daerah Bapak/Ibu untuk mengkaji dan mengembangkan inovasi pendidikan secara inklusif?
 5. Seberapa penting sebuah lembaga kajian dan pengembangan sistem pendidikan inklusif bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah Bapak/Ibu?

Kepala Sekolah

6. Sebagai Kepala Sekolah, apakah Bapak/Ibu memiliki program yang memfasilitasi guru-guru di sekolah untuk mendapatkan wawasan dan keahlian agar dapat mengimplementasikan pendidikan yang inklusif bagi peserta didik?
7. Seberapa penting sebuah lembaga kajian dan pengembangan sistem pendidikan inklusif bagi penyelenggaraan pendidikan di satdik Bapak/Ibu?

Guru

8. Sebagai guru, apakah Bapak/Ibu sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di kelas yang Bapak/Ibu ampu?

9. Jika sudah,
 - a. Apa perbedaan yang nyata antara model pendidikan inklusif dan model pendidikan yang diterapkan di satdik (satuan pendidikan) Bapak/Ibu saat ini?
 - b. Apakah hasil pelatihan dapat diterapkan di satdik (satuan pendidikan) tempat Bapak/Ibu mengajar?
 - c. Apa kendala penerapan pendidikan inklusif di satuan pendidikan Bapak/Ibu?
10. Jika belum, apakah Bapak/Ibu merasa perlu untuk mengikuti pelatihan tersebut. Mengapa?
11. Seberapa penting sebuah lembaga kajian dan pengembangan sistem pendidikan inklusif bagi penyelenggaraan pendidikan di satdik Bapak/Ibu?

Dana Kegiatan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 40.000.000,00, yang bersumber dari dana kegiatan Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) dan Komisi Pendidikan Dasar (DIKDAS) Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (DPPKB) Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil FGD yang bertemakan “Urgensi Pusat Kajian dan Pengembangan Inovasi Sistem Pendidikan Inklusif dalam Implementasi Merdeka Belajar di Kalimantan Barat” dan diselenggarakan di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa tema kajian tersebut diatas berkait erat secara jelas.

Walau tidak dilengkapi dengan data dari Kabupaten Melawi sebagai akibat tidak adanya respon dari pemerintah daerah ini, data yang diperoleh dari FGD di 13 kabupaten/kota lainnya sudah representatif untuk menggambarkan pemahaman sekaligus implementasi pendidikan inklusif oleh para pemangku kepentingan pendidikan di Kalimantan Barat.



Sumber: Dewan Pendidikan Kalbar, 2021

Gambar 1. FGD dengan moda daring bersama pemangku kepentingan Kabupaten Ketapang



Sumber: Dewan Pendidikan Kalbar, 2021

Gambar 2. FGD dengan moda daring bersama pemangku kepentingan Kabupaten Sambas

Dalam hal pemahaman konsep pendidikan inklusif, umumnya masih ditemukan pemahaman tentang pendidikan inklusif yang bias dengan disabilitas. Hampir semua pemangku kepentingan memahami pendidikan inklusif baru sebatas sebagai pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang diselenggarakan di sekolah umum. Beberapa pemangku kepentingan bahkan memahami sekolah

inklusi sebagai bentuk lain dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan memberi label “anak inklusi” kepada para peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tidak ada satupun pemangku kepentingan di 13 kabupaten/kota yang memahami pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang berpusat kepada murid dengan beragam kebutuhan yang harus diakomodir, termasuk beragam keterbatasan yang harus diantisipasi demi tercapainya keberhasilan proses pendidikan bagi semua peserta didik.



Sumber: Dewan Pendidikan Kalbar, 2021

Gambar 3. FGD dengan moda daring bersama pemangku kepentingan Kabupaten Kayong Utara (KKU)



Sumber: Dewan Pendidikan Kalbar, 2021

Gambar 4. FGD dengan pemangku kepentingan Kabupaten Sanggau

Dalam implementasinya, umumnya pendidikan inklusif diselenggarakan secara progresif dengan berbagai keterbatasan. Bahkan di kabupaten Kayong Utara, pendidikan inklusif terkondisi harus terselenggara karena minimnya jumlah murid yang berpartisipasi di sekolah-sekolah umum dengan keterbatasan pengetahuan dan keahlian para guru dalam menyelenggarakan model-model pendidikan inklusif di satuan pendidikan masing-masing. Secara rinci, implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Barat dapat digambarkan dalam penjelasan berikut ini.

Akses dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Bagi Semua Kebutuhan Belajar Masyarakat di Kalimantan Barat

Di Kabupaten Sekadau dan Ketapang, akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat masih terkotak-kotak antara peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus masih belum memiliki akses ke sekolah umum dan diarahkan untuk ke SLB. Di Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Landak dan Kapuas Hulu, akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas karena masih terkotak-kotak antara peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan akses ke sekolah umum dan diarahkan untuk ke SLB karena guru-guru masih belum mempunyai gambaran tentang model pendidikan inklusif yang harus diterapkan. Akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara terpenuhi

dalam aspek ekonomi, geografi dan demografi, namun tidak dalam aspek kebutuhan gaya dan daya belajar peserta didik. Layanan pendidikan berstandar kebutuhan peserta didik reguler diterapkan pada peserta didik berkebutuhan khusus karena akses ke sekolah umum terkondisi harus dibuka bagi semua tipe peserta didik untuk memenuhi standar jumlah minimal rombongan belajar di satuan pendidikan.

Di Kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Sintang, akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam aspek ekonomi, geografi dan demografi, namun dalam aspek kebutuhan gaya dan daya belajar peserta didik masih sangat terbatas. Layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sudah mulai dibuka di beberapa sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi namun belum dilengkapi dengan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah (pemda) setempat. Akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua kebutuhan masyarakat di Kabupaten Singkawang dan Sambas terpenuhi dalam aspek ekonomi, geografi dan demografi, namun dalam aspek kebutuhan gaya dan daya belajar peserta didik masih sangat terbatas. Layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sudah mulai dibuka di beberapa sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi dan sudah dilengkapi oleh regulasi dan kebijakan pemda setempat.

Di Kota Pontianak, akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam aspek ekonomi, geografi dan demografi. Dalam aspek kebutuhan gaya dan daya belajar peserta didik, layanan pendidikan bagi peserta didik

penyangang disabilitas mulai diselenggarakan di beberapa sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi yang tersebar merata di setiap kecamatan yang didukung oleh pendidik yang terlatih serta regulasi dan kebijakan pemda.

Penerapan Model Pembelajaran dan Assessment yang Berpusat Pada Murid

Di Kabupaten Sekadau, Sanggau, Sintang, Landak, Ketapang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Bengkayang, Mempawah, dan Kubu Raya, model pembelajaran dan *assessment* berstandar kebutuhan peserta didik reguler yang berpusat pada guru (*teacher centered*) diterapkan untuk seluruh peserta didik. Peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata diberikan tambahan jam pembelajaran dan masih menerapkan sistem tidak naik kelas untuk peserta didik yang lamban belajar dan tidak memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Satuan pendidikan tidak menyediakan guru pendamping/guru pendamping khusus bagi siswa yang membutuhkan.

Di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, model pembelajaran untuk siswa yang lamban belajar sudah mulai disesuaikan berdasar kebutuhan daya belajar siswa namun *assessment* yang diberikan untuk seluruh peserta didik masih berstandar kebutuhan peserta didik reguler. Model pembelajaran secara umum masih berpusat kepada guru (*teacher centered*) dengan memberikan perlakuan khusus kepada murid yang membutuhkan dan sistem tidak naik kelas untuk peserta didik yang lamban belajar dan tidak memenuhi standar KKM masih tetap diterapkan. Guru pendamping khusus

disediakan oleh orang tua murid, bukan oleh satuan pendidikan.

Di Kota Pontianak, model pembelajaran dan *assessment* sudah diterapkan terbagi untuk siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam bentuk Program Pembelajaran Individu (PPI). Model pembelajaran secara umum masih berpusat kepada guru (*teacher centered*) namun satuan pendidikan sudah menyediakan guru pendamping/guru pendamping khusus bagi siswa berkebutuhan khusus.

Jaminan Kualitas Guru sebagai Fasilitator (Bukan Pemberi Ilmu) dan Kepala Satuan Pendidikan Sebagai Pendukung Utama Pengembangan Kualitas Guru

Di Kabupaten Sekadau dan Ketapang, guru masih berperan sebagai pemberi ilmu saja karena keterbatasan dalam memetakan kebutuhan belajar siswa dan kepala satuan pendidikan belum mampu menjalankan peran sebagai pendukung utama pengembangan kualitas guru. Pemerintah daerah masih belum memperhatikan jaminan kualitas guru sebagai fasilitator. Di Kabupaten Sanggau, Sintang, Landak, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Bengkayang, Mempawah dan Kubu Raya, peran dominan guru masih sebagai pemberi ilmu namun sudah mampu memetakan kebutuhan belajar siswa. Dengan kemampuan merancang model belajar berdasar kebutuhan belajar siswa yang sangat terbatas, guru masih bingung menjalankan peran sebagai fasilitator. Di sisi lain kepala satuan pendidikan belum mampu menjalankan peran sebagai pendukung utama pengembangan kualitas guru karena mengalami keterbatasan yang sama dalam wawasan dan pengetahuan tentang

peran guru dalam sistem pendidikan inklusif. Pemerintah daerah memahami peran guru sebagai fasilitator secara terbatas namun belum mampu memberikan jaminan kualitas guru sebagai fasilitator dalam pendidikan yang inklusif.

Peran dominan guru di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang masih sebagai pemberi ilmu, namun sudah mampu memetakan kebutuhan belajar siswa walau terbatas. Dengan kemampuan merancang model belajar berdasar kebutuhan belajar siswa yang sangat terbatas, guru masih bingung menjalankan peran sebagai fasilitator. Namun demikian, kepala satuan pendidikan sudah menjalankan peran sebagai pendukung utama pengembangan kualitas guru walaupun memiliki keterbatasan dalam wawasan dan pengetahuan tentang peran guru dalam sistem pendidikan inklusif. Pemerintah daerah memahami peran guru sebagai fasilitator namun masih terbatas dalam memberikan jaminan kualitas yang dibutuhkan dalam sistem pendidikan inklusif.

Di Kota Pontianak, guru sudah memahami perannya sebagai fasilitator namun masih mengalami keterbatasan dalam memetakan kebutuhan belajar siswa dan merancang model belajar berdasar kebutuhan belajar siswa tersebut. Kepala satuan pendidikan sudah menjalankan peran sebagai pendukung utama pengembangan kualitas guru dilengkapi dengan wawasan dan pengetahuan tentang peran guru dalam sistem pendidikan inklusif. Pemerintah daerah memfasilitasi guru dengan bimbingan teknis dan layanan pemetaan kebutuhan siswa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai jaminan kualitas guru.

Ekosistem Pendidikan yang Inklusif dan Bebas Perundungan

Ekosistem pendidikan di Kabupaten Sekadau dan Ketapang masih bersifat segregatif dalam pemenuhan layanan kebutuhan yang beragam dan masih terjadi perundungan kepada peserta didik yang berbeda kebutuhan. Di Kabupaten Sanggau, Sintang, Landak, Ketapang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Bengkayang, Mempawah dan Kubu Raya, ekosistem pendidikan masih bersifat segregatif dalam pemenuhan layanan kebutuhan yang beragam namun perundungan kepada peserta didik yang berbeda kebutuhan dapat diminimasi dengan pengawasan yang ketat. Ekosistem pendidikan di Kota Pontianak, Singkawang dan Kabupaten Sambas mengarah inklusif dimana semua warga satuan pendidikan mulai saling beradaptasi terhadap keberagaman yang ada, namun masih perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar terbangun ekosistem pendidikan yang bebas perundungan.

Manifestasi Dukungan Kebijakan Pemda Terhadap Implementasi Pendidikan Inklusif dan Optimasi Infrastruktur Satuan Pendidikan Dalam APBD

Dari hasil *FGD* ditemukan bahwa Kabupaten Sekadau, Landak, Ketapang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Bengkayang, Mempawah dan Kubu Raya belum memberikan dukungan kebijakan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif karena masyarakat dengan hambatan belajar langsung diarahkan ke SLB. Optimasi infrastruktur yang mendukung pendidikan inklusif tidak termanifestasi dalam APBD.

Kabupaten Sanggau dan Sintang belum juga memberikan dukungan

kebijakan pemda terhadap implementasi pendidikan inklusif namun satuan pendidikan tertentu sudah melayani peserta didik berkebutuhan khusus dengan keterbatasan yang ada. Optimasi infrastruktur satuan pendidikan yang mendukung pendidikan inklusif tidak termanifestasi dalam APBD.

Ditemukan bahwa di Kabupaten Sambas, Kota Pontianak dan Singkawang sudah ada dukungan kebijakan pemda terhadap implementasi pendidikan inklusif dengan segala keterbatasan yang ada. Optimasi infrastruktur satuan pendidikan yang mendukung pendidikan inklusif termanifestasi secara minimal dalam APBD.

Korelasi Pelatihan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Model Pembelajaran yang Diterapkan di Satuan Pendidikan

Di Kabupaten Sekadau, Sanggau, Landak, Ketapang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Bengkayang dan Mempawah, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) belum pernah mendapatkan pelatihan tentang model pembelajaran inklusif dan belum menerapkannya di satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di Kabupaten Kubu Raya pernah mendapatkan pelatihan tentang model pembelajaran inklusif tapi belum menerapkannya di satuan pendidikan.

Di Kabupaten Sintang dan Sambas serta Kota Singkawang dan Pontianak, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) pernah mendapatkan pelatihan tentang model pembelajaran inklusif dan sudah menerapkan hasil pelatihan namun belum mampu mengembangkannya sesuai kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan.

Fleksibilitas Kurikulum, Pedagogi, Model Pembelajaran serta Rasio Guru dan Peserta Didik dalam Pemenuhan Kebutuhan Belajar dan Pembangunan Karakter Peserta Didik

Di Kabupaten Sekadau, Sanggau, Landak, Ketapang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Bengkayang, Mempawah dan Kubu Raya, kurikulum, pedagogi, model pembelajaran serta rasio guru dan peserta didik belum fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan belajar dan pembangunan karakter peserta didik. Sementara itu, di Kabupaten Sintang, Sambas dan Kota Singkawang, pedagogi dan model pembelajaran sudah mulai fleksibel namun kurikulum serta rasio guru dan peserta didik masih belum fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan belajar dan pembangunan karakter peserta didik. Di Kota Pontianak, kurikulum, pedagogi dan model pembelajaran sudah mulai fleksibel namun rasio guru dan peserta didik belum fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan belajar dan pembangunan karakter peserta didik.

Secara ringkas, temuan yang diperoleh dari hasil FGD sebagai berikut:

1. Dalam hal akses dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua kebutuhan belajar masyarakat di Kalimantan Barat, layanan pendidikan inklusif yang tidak terbatas pada penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas namun juga masyarakat dengan kebutuhan khusus lainnya seperti meliputi kondisi sosial dan psiko-sosial yang berbeda dari masyarakat pada umumnya melalui optimasi sinergitas satuan-satuan pendidikan formal dan non formal yang ditunjuk

sebagai satuan pendidikan inklusif yang tersebar merata di setiap kecamatan serta didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah daerah belum diimplementasikan.

2. Di Kalimantan Barat, belum diimplementasikan model pembelajaran dan *assessment* yang tidak lagi terbagi untuk siswa reguler dan berkebutuhan khusus melainkan sudah dirancang sesuai kebutuhan daya dan gaya belajar masing-masing siswa dalam Program Pembelajaran Individu (PPI). Model pembelajaran belum berpusat kepada murid (*student centered learning*) dan satuan pendidikan belum menyediakan guru pendamping/guru pendamping khusus bagi siswa yang membutuhkan.
3. Jaminan kualitas guru sebagai fasilitator (bukan pemberi ilmu) dan kepala satuan pendidikan sebagai pendukung utama pengembangan kualitas guru masih sangat minim terimplementasi. Guru masih belum memahami dan belum mampu menjalankan peran guru sebagai fasilitator sehingga mampu memetakan kebutuhan belajar siswa untuk merancang model belajar berdasar kebutuhan belajar siswa tersebut. Kepala satuan pendidikan belum optimal menjalankan peran sebagai pendukung utama pengembangan kualitas guru yang didukung oleh Pemerintah daerah dalam memfasilitasi guru untuk mengembangkan inovasi model pembelajaran bagi beragam kebutuhan belajar

- masyarakat secara inklusif di sekolah-sekolah yang ditunjuk.
4. Ekosistem pendidikan masih kurang inklusif; semua warga satuan pendidikan belum terbiasa berinteraksi dalam keberagaman sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang bebas perundungan.
 5. Manifestasi dukungan kebijakan Pemda terhadap implementasi pendidikan inklusif dan optimasi infrastruktur satuan pendidikan dalam APBD masih sangat minim. Optimasi infrastruktur satuan pendidikan yang mendukung pendidikan inklusif belum termanifestasi secara optimal dalam APBD.
 6. Belum ada korelasi pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan model pembelajaran yang diterapkan di satuan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) pernah mendapatkan pelatihan tentang model pembelajaran inklusif namun belum mampu mengembangkan penerapannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan.
 7. Dukungan kebijakan Pemda terhadap implementasi pendidikan inklusif dan optimasi infrastruktur satuan pendidikan belum termanifestasi dalam APBD. Kurikulum, pedagogi, model pembelajaran serta rasio guru dan peserta didik belum fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan belajar dan pembangunan karakter peserta didik.

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh tentang pemahaman konsep beserta implementasi sistem pendidikan

inklusif di 13 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat tergambar bahwa sistem pendidikan inklusif masih dipahami sebagai konsep pendidikan yang bias dengan disabilitas. Para pemangku kepentingan belum memahami pendidikan inklusif sebagai sebuah proses untuk mengatasi hambatan yang membatasi kehadiran, partisipasi dan capaian siswa (UNESCO, 2015 yang melibatkan dan meminimalkan hambatan dan partisipasi serta memaksimalkan sumber-sumber pendukungnya (AINSCOW et al., 2004) agar tercipta pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Sistem pendidikan yang diimplementasikan di 13 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat belum mampu memenuhi hak dan kesempatan pada masyarakat usia sekolah untuk memperoleh pendidikan tanpa harus dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi.

Dalam hal implementasi sistem pendidikan inklusif, Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Kalimantan Barat yang sudah mengeluarkan regulasi berbentuk Peraturan Walikota sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif yang berkembang sangat progresif bagi masyarakat di wilayahnya. Namun demikian, Kota Pontianak masih mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi pembelajaran terdiferensiasi sebagai salah satu ciri khas pendidikan inklusi. Instruksi terdiferensiasi belum dapat digunakan dalam penanganan keberagaman murid karena terbatasnya pengetahuan dan kapasitas pendidik di sekolah-sekolah yang ditetapkan

sebagai sekolah inklusi oleh pemerintah kota.

Kota Singkawang, kabupaten Sintang dan Sambas sudah mengeluarkan peraturan walikota/bupati untuk penunjukan beberapa sekolah inklusi namun masih terkendala dalam penerapan sistem pendidikan yang inklusif karena keterbatasan anggaran dan bimbingan teknis. Selibuhnya, pemangku kebijakan dan penyelenggara pendidikan di kabupaten dan kota lain masih dalam tahap mengkaji dan merancang anggaran bagi implementasi sistem pendidikan inklusif sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program Merdeka Belajar. Pemerintah daerah juga masih harus mengupayakan adanya peningkatan wawasan, pengetahuan dan kompetensi tenaga pendidik untuk menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang cocok untuk kelas inklusi karena strategi pembelajaran terdiferensiasi dapat diterapkan untuk mayoritas murid dengan atau tanpa kebutuhan khusus (Mittler, 2012). Membekali tenaga pendidik dengan pengetahuan dan kompetensi pembelajaran terdiferensiasi akan menjadi solusi bagi penyelenggaraan proses pembelajaran yang berpusat pada murid dalam konteks Merdeka Belajar karena pembelajaran terdiferensiasi menyediakan modifikasi proses dan capaian pembelajaran bagi murid-murid yang berkesulitan belajar atau yang berkemampuan di atas rata-rata (Baglieri & Knopf, 2004)

Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dalam rangka mendiseminasi konsep pendidikan inklusif yang tidak bias disabilitas, berpusat pada murid dan mengakomodir beragam kebutuhan

murid demi tercapainya pendidikan yang layak bagi semua peserta didik. Kajian dan pengembangan inovasi model pendidikan inklusif akan dapat memberikan kejelasan arah dan strategi untuk penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi semua kebutuhan masyarakat sehingga angka partisipasi sekolah (APS) dapat secara langsung ditingkatkan. Meningkatnya APS dan kualitas pendidikan akan dengan sendirinya meningkatkan tingkat kelulusan siswa hingga ke jenjang pendidikan menengah atas bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Semua pemangku kepentingan pendidikan di Kalimantan Barat dengan antusias menyatakan bahwa mereka berkeinginan kuat untuk dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif secara utuh demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Untuk itu mereka sangat membutuhkan pengembangan wawasan dan bimbingan teknis untuk dapat memetakan kebutuhan siswa, merancang dan berinovasi dalam penerapan dan pengembangan model-model pendidikan inklusif di daerah masing-masing mengingat bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya mampu membuka wawasan tentang konsep pendidikan inklusif namun tak cukup untuk mendalami dan menguasai praktek di lapangan. Para guru membutuhkan sekolah-sekolah laboratorium yang merupakan bagian dari lembaga yang mengkaji dan mengembangkan inovasi sistem pendidikan yang inklusif. Untuk itu para pemangku kepentingan pendidikan Kalbar dengan lugas menyatakan bahwa Sekolah Laboratorium sebagai Lembaga Kajian dan Pengembangan Inovasi Sistem Pendidikan Inklusif di Kalimantan Barat sangat penting (*urgent*) untuk

segera didirikan dalam rangka mempercepat terimplementasinya program Merdeka Belajar secara nyata dan merata di Kalimantan Barat.

KESIMPULAN

Perlu dilakukan diseminasi secara meluas, intensif dan merata tentang konsep dan model pendidikan inklusif yang tidak bias dengan pendidikan khusus disabilitas karena secara nyata berdampak pada arah kebijakan dan regulasi pendidikan di daerah. Untuk itu Lembaga Kajian dan Pengembangan Inovasi Sistem Pendidikan Inklusif berbentuk Sekolah-sekolah Laboratorium (*Lab School*) di Kalimantan Barat sangat penting (*urgent*) dan sangat dibutuhkan untuk mempercepat terimplementasinya sistem pendidikan yang inklusif sebagai bagian dari implementasi program Merdeka Belajar.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan dibentuknya Sekolah-sekolah Laboratorium sebagai lembaga kajian dan pengembangan inovasi sistem pendidikan inklusif di Kalimantan Barat untuk merealisasikan kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat di bidang pendidikan. Hal ini kami nilai sangat penting karena program Merdeka Belajar sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat peningkatan IPM Kalbar di bidang pendidikan. Program ini tidak akan terealisasi baik tanpa adanya sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodir keberagaman kebutuhan siswa. Dengan adanya lembaga ini diharapkan peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia di

Kalimantan Barat dapat terakselerasi dalam arah dan manifestasi yang lebih jelas sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih peneliti sampaikan pada Pimpinan Dewan Pendidikan Kalimantan Barat beserta jajaran atas dukungan pendanaan dan lainnya demi terselenggaranya kajian ini. Kepada anggota tim peneliti, Bapak Syaparmar, S.T, M.Hum dan Bapak Romdion, S.Sos.I terimakasih atas kerjasama yang sangat baik dalam pengumpulan data di lapangan. Terima kasih juga untuk seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AINSCOW, M. E. L., BOOTH, T., & DYSON, A. (2004). Understanding and developing inclusive practices in schools: a collaborative action research network. *International Journal of Inclusive Education*, 8(2), 125–139. <https://doi.org/10.1080/1360311032000158015>
- Armijo, B. (2022, January 3). *Is a “Lab School” right for your child? - Lab schools can offer innovative approaches to education*. <https://www.usnews.com/education/k-12/articles/is-a-lab-school-right-for-your-child>.
- Baglieri, S., & Knopf, J. H. (2004). Normalizing difference in inclusive teaching. *Journal of Learning Disabilities*, 37(6), 525–529.
- Bosker, R. J. (2005). *De grenzen van gedifferentieerd onderwijs*.

- César, M., & Santos, N. (2006). From exclusion to inclusion: Collaborative work contributions to more inclusive learning settings. *European Journal of Psychology of Education, 21*(3), 333–346.
- Durst, A. (2010). *Women educators in the progressive era: The women behind Dewey's Laboratory School*. Springer.
- Gheysens, E., Coubergs, C., Griful-Freixenet, J., Engels, N., & Struyven, K. (2020). Differentiated instruction: the diversity of teachers' philosophy and praxis to adapt teaching to students' interests, readiness and learning profiles. *International Journal of Inclusive Education, 1*–18.
- Hofman, R. H., & Kilimo, J. S. (2014). Teachers' attitudes and self-efficacy towards inclusion of pupils with disabilities in Tanzanian schools. *Journal of Education and Training, 1*(2), 177–198.
- Kurtts Ph D, S. A. (2006). Universal design for learning in inclusive classrooms. *Electronic Journal for Inclusive Education, 1*(10), 7.
- Mittler, P. (2012). *Working towards inclusive education: Social contexts*. David Fulton Publishers.
- Permana, R. H. (2019, December 4). *PISA 2018: 41% Siswa Indonesia Korban Bullying, 17% Dilanda Kesepian*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-4809711/Pisa-2018-41-Siswa-Indonesia-Korban-Bullying-17-Dilanda-Kesepian>.
- Rofiah, N. H., & Rofiana, I. (2017). Penerapan metode pembelajaran peserta didik slow learner. *NATURALISTIC: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, 2*(1), 94–107.
- Rofiah, N. H., Sudiraharja, D., & Ediyanto, E. (2020). The Implementation Inclusive Education: Implication for Children with Special Needs in Tamansari Elementary School in Yogyakarta. *International Journal of Educational Management and Innovation, 1*(1), 82–90.
- Supriyanto, D. (2019). Teachers' Attitudes Towards Inclusive Education: A Literature Review. *Indonesian Journal of Disability Studies, 6*(1), 29–37.
- Tomlinson, C. A. (1999). Mapping a route toward differentiated instruction. *Educational Leadership, 57*, 12–17.
- Twyman, K. A., Saylor, C. F., Saia, D., Macias, M. M., Taylor, L. A., & Spratt, E. (2010). Bullying and ostracism experiences in children with special health care needs. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 31*(1), 1–8.
- UNESCO. (2015). *Inclusion in Education: Leaving No Learner Behind*. UNESCO.
- Woolfolk, A. (2019). *Educational Psychology* (14th ed.). The Ohio State University: Pearson Education International.